

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
Studi tentang Kesadaran Hukum Peredaran Daging Sapi di
Kabupaten Boyolali



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu
Hukum pada Sekolah Pascasarjana

Oleh:
WAHYUDI SETIYAWAN
R 100 186 004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Studi tentang Kemudahan Hukum Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyolali

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WAHYUDI SETIYAWAN

R 100 186 004

Tealhi diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum

NIK/NIP. 535

Dosen Pembimbing II



Dr. Kelik Wardiono, SH., M.H

NIDN. 0026126801

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Studi tentang Kesadaran Hukum Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyolali

Oleh:

WAHYUDI SETIYAWAN

R 100 186 004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Megister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari:
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, SH., M.Hum (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Prof. Dr. Harun, S.H., M.H (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Direktur,



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
NIP. 196205141985031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Agustus 2020

Penulis



WAHYUDI SETIYAWAN

R100 186 004

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Studi tentang Kesadaran Hukum Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyolali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran daging sapi, penyebab penegakan hukum untuk menjamin kesehatan peredaran daging sapi tidak berjalan, perlindungan hukum bagi konsumen daging sapi melalui upaya penegakan hukum peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali ini mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum terkait peredaran daging sehat dan aman di Kabupaten Boyolali belum berjalan dengan baik atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran mengenai ketentuan-ketentuan di dalam pengelolaan RPH yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan potensi peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman, hal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Boyolali yaitu faktor pengetahuan hukum, pemahaman hukum, meskipun didukung oleh faktor sikap hukum dan pola perilaku hukum yang baik.

Kata Kunci: Perlindungan, Kesadaran, Konsumen, Daging.

Abstrack

Research aimed at describing and explaining public legal awareness of beef distribution, causes of law enforcement to ensure the health of beef cattle is not working, legal protection for beef consumers through law enforcement efforts in beef distribution in Boyolali Regency is based on the non-approach method qualitative doctrinal. Therefore, in this study, it is more focused on primary data collected by interviews and observations and supported by secondary data collected by library research. Data that has been processed for further qualitative analysis. Based on the results of the study it was found that legal protection related to healthy and safe meat distribution in Boyolali District has not been going well or in accordance with statutory provisions, evidenced by the large number of violations regarding the provisions in the management of slaughterhouses carried out by business actors causing potential circulation beef which is unhealthy and safe, this is influenced by the legal awareness of the community in Bouyolali Regency namely the legal knowledge factor, legal understanding, even though it is supported by legal attitude factors and good legal behavior patterns.

Keywords: Protection, Consciousness, Consumer, Meat.

1. PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam. Salah satu sumber daya alam tersebut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah sapi potong.¹ Dari data yang diperoleh oleh penulis dari badan Pusat Statistik Nasional, data populasi sapi potong menurut Provinsi tahun 2009-2017, pada tahun 2017 jumlah sapi potong di Indonesia sebanyak 16.599.247 sapi potong.² dan dengan jumlah produksi daging pada tahun 2017 sebesar 531 756.98 ton.³ jumlah RPH dan TPH di Indonesia adalah 1.201 yang tersebar di 34 provinsi dan 45 persen RPH/TPH terdapat di Pulau Jawa yakni sebanyak 527 RPH/TPH.⁴

Dengan banyaknya rumah tangga yang memiliki sapi tersebut ternyata banyak juga pelaku usaha yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan melakukan pembelian sapi yang mengalami keracunan, gangguan metabolisme, diare dan atau karena berbagai hal lainnya yang menyebabkan sapi tersebut mati.⁵

Pengaturan jaminan keamanan peredaran daging di dalam ajaran agama Islam hal ini diatur di surat Al-Baqarah ayat 173, di dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala BPOM No.14 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹ Aryogi dan Endang Romjali, 2017, *Potensi, Pemanfaatan dan Kendala Pengembangan Sapi Potong Lokal Sebagai Kekayaan Plasma Nutfah Indonesia*, Pasuruan: Lokakarya Nasioanl Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Hal. 151.

²² <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/17/1016/populasi-sapi-potong-menurut-provinsi-2009-2017.html>, di akses pada hari senin 14 Januari 2019, Pukul 12:41 WIB.

³<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/18/1038/produksi-daging-sapi-menurut-provinsi-2009-2017.html>, di akses pada hari senin 14 Januari, Pukul 12:51 WIB.

⁴ Subdirektorat Statistik peternakan, 2019, *Direktori Perusahaan Pertanian Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, Hal. 7.

⁵ Sani Indiraningsih, 2013, *Identifikasi Penyebab Kematian Sapi Potong Dalam Program PSDS-K di Jawa Tengah*, Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2013, Hal.187.

Namun walaupun ada beberapa peraturan yang telah mengatur terkait dengan keamanan daging sapi akan tetapi pada kenyataannya masih banyak oknum yang menjual daging yang tidak sesuai seperti dalam Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pernakan dan Kesehatan Hewan) dimana pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yaitu mengangkut sebanyak 300 kg daging yang merupakan daging sapi glonggongan dengan ciri-ciri fisik daging terlihat basah dengan kandungan air berlebih.

Hal ini perlu diteliti karena daging sapi yang tidak aman dan sehat dapat mengakibatkan bahaya yaitu timbulnya penyakit dan berbahaya. Oleh karena bahaya tersebut diperlukan upaya penegak hukum yang tegas, karena peredaran makanan yang baik dan aman berarti turut serta meningkatkan terwujudnya kesejahteraan Negara.⁶Sementara itu, pengaturan di dalam peraturan-peraturan yang ada belum memberikan pengaturan yang jelas baik terkait dengan penegakan hukum yang harus dilakukan ataupun penggelonggongan daging aman dan sehat itu tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan penegakan hukum belum memadai atau sesuai.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka masalahnya dirumuskan: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali (2) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum masyarakat?

2. METODE

Penelitian ini mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuisioner kepada masyarakat Boyolali dan wawancara terhadap Dinas Pertenakan Boyolali, Dinas Kesehatan Boyolali dan Kepolisian Reserse Boyolali dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan

⁶ Agung, 2016, *Mewaspada Makanan Tak Halal Menjelang Idul Fitri*, 30 Juni 2016, [ugm.ac.id/id/berita/12032-mewaspada-makanan.tak.halal.menjelang.idul.fitri](http://ugm.ac.id/id/berita/12032-mewaspada-makanan-tak-halal-menjelang-idul-fitri), diakses tanggal 7 januari 2019, Pukul 12:00 WIB.

yaitu analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan juga penafsiran data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Daging Sapi Di Kabupaten Boyolali

Perwujudan hak atas kesehatan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan contohnya pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk oleh World Health Organization (WHO).⁷ Di dalam penelitian yang dilakukan penulis berikut penjelasan perlindungan yang sudah diberikan yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif

1) Pemotongan Daging

Pemotongan daging diatur di dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Yang di dalamnya mengatur terkait dengan beberapa hal yaitu:

a) Persyaratan rumah potong hewan

Persyaratan rumah potong hewan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendirikan sebuah RPH dimana persyaratan tersebut meliputi lokasi, persyaratan sarana pendukung, persyaratan tata letak, desain dan konstruksi dan persyaratan peralatan.

Namun dari data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan apabila hanya satu pelaku usaha di Boyolali yang memenuhi persyaratan tersebut yaitu Ndakir, selain itu pelaku usaha lain ada yang sepenuhnya tidak sesuai dan ada yang beberapa yang tidak sesuai dan sudah ada yang sesuai. Namun demikian meskipun tidak sesuai operasional rumah potong hewan ini tetap berjalan dengan rutinitas seperti biasanya padahal seperti misalnya peralatan yang tidak mendukung atau korosif akan menyebabkan mutu daging tidak sehat dan aman

⁷ Absori, Ta'adi Samsuri, dan Khudzaifah Dimiyati, 2018, *Justice-Based Health Law: Study of Profession Equality Based Justice On Social Justice*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.18 No.2 May 2018, hal 163.

selain terhadap daging itu sendiri lokasi yang tidak sesuai juga akan berdampak kepada masyarakat sekitar terkait dengan lingkungan. Dengan demikian dalam hal ini pada praktiknya tidak dilaksanakan dengan baik dan pengawasan dari pemerintah sangat minim.

b) Persyaratan unit penanganan daging

Persyaratan unit penanganan daging yaitu hampir sama dengan persyaratan rumah potong hewan dimana yang membedakan yaitu mengenai penanganan daging setelah produksi yang harus di masukan ke ruang pembekuan, pengemasan, dan peralatan untuk melakukan distribusi daging dengan baik

Namun pada praktiknya yang ada dari hasil penelitian yang dilakukan penulis hasilnya dari beberapa ketentuan mengenai persyaratan tata letak, desain dan konstruksi yang mendukung yang tidak ada pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karenanya mengakibatkan daging yang diterima oleh konsumen akan berpotensi tidak sehat dan aman.

c) Persyaratan higiene dan sanitasi (Pasal 35)

Mengenai persyaratan hygiene dan sanitasi ini di dalam ketentuan sebagaimana yang dijelaskan di atas mengatur mengenai harus tersedianya peralatan mencuci sepatu boot, fasilitas cuci tangan, fasilitas mencuci pisau, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi pemotongan daging, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Namun dari data yang diperoleh hanya pelaku usaha Ndakir dan Ahmadi yang telah sesuai dengan ketentuan tersebut, hal ini menunjukkan apabila mayoritas pelaku usaha lain tidak memperhatikan persyaratan higiene dan sanitasi, padahal ketentuan ini akan mempengaruhi kesehatan konsumen karena daging yang dihasilkan tersebut. Dengan demikian diperlukan pengawasan dan perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah dan dinas untuk melakukan tindakan yang tegas.

d) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai penerapan kesehatan hewan di RPH, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di sembelih, pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas, pemeriksaan pemenuhan persyaratan *hygiene-sanitasi* proses produksi.

Namun pada kenyataannya tidak ada satupun pelaku usaha yang dilakukan observasi memenuhi ketentuan tersebut, hal ini menunjukkan apabila pengawasan kesehatan veteriner masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi perlindungan yang dilakukan agar daging yang beredar di masyarakat merupakan daging yang sehat dan aman.

e) Izin mendirikan rumah potong hewan dan izin usaha pemotongan hewan

Izin mendirikan rumah potong hewan merupakan syarat administrasi yang mesti dimiliki oleh pelaku usaha agar kegiatan yang dilakukan memiliki kepastian hukum dan sah di mata hukum. Oleh karena itu izin mendirikan rumah potong hewan ini sangat penting.

Namun dari data yang diperoleh penulis penulis dari 10 pelaku usaha di Kabupaten Boyolali hasilnya 6 pelaku usaha memiliki izin sementara 4 lainnya tidak memiliki izin usaha dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim, karena masih adanya pelaku usaha yang beroperasi tetapi tidak memiliki izin usaha.

f) Sumber daya manusia

Ketentuan mengenai sumber daya manusia mengharuskan adanya dokter hewan di dalam RPH dan juga adanya tenaga ahli di dalam RPH dari data yang diperoleh penulis hasilnya tidak ada satupun pelaku usaha yang memenuhi ketentuan ini, seluruhnya hanya memiliki tenaga ahli di dalam pemotongan hewan. Padahal dokter hewan ini memiliki peran yang sangat penting yang dimana akan berkontribusi dalam melakukan pemeriksaan hewan sebelum di sembelih, dan proses pemeriksaan daging setelah disembelih.

2) Peredaran Daging

Peredaran daging diatur di dalam Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel

Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional. Di dalam pembahasan ini penulis membedakan menjadi beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1) Transportasi dari sumber ke Pasar

Di dalam pasal 5.1 mengatur mengenai penanganan pangan disebutkan jika alat transportasi pangan dan juga wadah yang dipakai guna mengirim pangan, kemasan atau wadah dan material lainnya akan digunakan untuk pangan sebaiknya di dalam kondisi bersih dan tidak digunakan untuk mengangkut bahan selain pangan. Transportasi pangan segar seperti daging dan ikan mesti di dalam kemasan bersih dan di dalam kondisi dingin suhu 4 derajat celcius. Di dalam Pasal 5.2.1 lebih lanjut dijelaskan untuk jenis pangan daging harus datang dari pemasok dengan wadah atau kendaraan yang berpendingin.

Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi di beberapa depot penjualan daging sapi di Kabupaten Boyolali, dari hasil observasi yang sudah dilakukan oleh penulis menunjukan jika masih terdapat beberapa penjual daging sapi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Berikut ini penulis tunjukan gambar hasil observasi yang dilakukan penulis yaitu:

2) Higiene Pedagang dan Pekerja Pasar

Di dalam bab III pasal 3.3 menyebutkan jika pedagang dan pekerja pasar yang sebaiknya untuk menjaga kebersihan pribadinya dengan memperhatikan di dalam Pasal 3.3.1 kebersihan badan di dalam perdagangan sebaiknya selalu memakai menggunakan pakain yang bersih dan menjaga kebersihan badannya pada ayat (1) disebutkan secara khusus “pedagang pangan segar (produk ikan dan daging) sebaiknya memakai pakaian kerja (apron atau celemek).

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa lokasi penjualan sapi di Kabupaten Boyolali, masih ditemukan masih banyak pelanggaran terhadap penggunaan apron atau celemek.

3) Lokasi dan Lingkungan

Di dalam pasal 4.1 lokasi dan lingkungan di dalam Pasal 4.1.1 tentang lokasi yang menyebutkan Pasar tradisional semestinya ada di lokasi yang terjaga kebersihannya, bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan juga debu. Saran jala

di pasar tradisional dan sekitarnya hendaknya dapat menjamin kebersihan dan kelancaran distribusi. Untuk selanjutnya di dalam Pasal 4.1.2 tentang lingkungan seharusnya selalau dipertahankan di dalam keadaan yang bersih dengan yaitu sampah dibuang dan tidak menumpuk, tempat sampah selalu tertutup, jalan dipelihara agar tidak berdebu dan selokannya berfungsi dengan baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan lokasi tergolong cukup bersih dan nyaman namun terkait dengan lingkungan masih ditemukan tempat sampah yang tidak tertutup. Berikut ini penulis tunjukan gambar terkait hasil observasi yang dilakukan penulis yaitu:

4) Penyimpanan pangan

Di dalam BAB V tentang penanganan pangan Pasal 5.3.1 poin 5.3.1.3, terkait penyimpanan pangan segar khususnya daging harus memenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) Segera sesudah diterima, daging segar mesti disimpan pada suhu tidak lebih dari 4°C (41°F), sebaiknya pada suhu antara -1°C sampai 2°C, guna menekankan pertumbuhan bakteri pembusuk. Penyimpanan daging beku dipertahankan pada suhu -18°C dan produk dibungkus rapat.
- b) Selama penyimpanan, daging mesti dilindungi dari hama, debu, uap air dan lingkungan yang tidak bersih. Daging tidak boleh disimpan di ruang loker, area pencucian, tempat sampah, ruang mekanik, di bawah pipa, atau di area penyimpanan bahan kimia.
- c) Menerapkan FIFO yaitu daging yang lebih awal masuk digunakan atau dijual terlebih dahulu.

Jika dilihat dari observasi yang dilakukan oleh penulis maka terkait dengan penyimpanan pangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dimana daging tidak dijaga di dalam keadaan suhu yang sudah ditentukan, akan tetapi daging yang hanya dibiarkan di dalam karung yang tidak berpendingin.

5) Pemajangan/ penyajian

Di dalam Pasal BAB V tentang penanganan pangan pasal 5.4 poin 5.4.1 sub 5.4.1.1 tentang pemajangan dan penyajian daging menyebutkan:

- a) Penyajian karkas daging segar harus digantung, Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka terdapat beberapa daging yang digantung namun juga terdapat daging yang tidak digantung oleh penjual.
- b) Karkas dan daging yang sudah dipotong dipajang dalam kondisi dingin, Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dan sebagaimana terlihat dari gambar di atas maka karkas dan daging yang sudah dipotong tidak dipajang di dalam keadaan yang dingin.
- c) Daging beku disimpan dan dijual dalam kondisi beku. Penyimpanan dipertahankan pada suhu -18°C , Dari observasi yang dilakukan oleh penulis maka dapat terlihat jika tidak ada tempat pendingin untuk mempertahankan suhu 18°C
- d) Pemotongan daging tidak menggunakan alas pemotongan (telenan) kayu
Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis maka diketahui jika pemotongan daging menggunakan telenan kayu.
- e) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan jika tidak terdapat tempat yang disediakan untuk keperluan pencucian bahan pangan dan peralatan yang digunakan untuk memotong daging sapi.

6) Penyerahan kepada konsumen

Di dalam pasal 5.5 tentang Penyerahan kepada konsumen menyebutkan:

- a) Penggunaan kemasan untuk pangan siap saji mesti diperhatikan, ialah tidak memakai kemasan kantong plastik hitam, plastik daur ulang, kertas Koran/ kertas bertinta, dan kemasan yang dilarang untuk pangan siap saji
- b) Pada penjualan pangan siap saji, antara yang menangani dan menerima uang harus orang yang berbeda. Jika dilakukan oleh orang yang sama maka harus cuci tangan sebelum menangani pangan.

Terkait dengan penyerahan kepada konsumen dari ketentuan di atas diatur mengenai penggunaan plastik hitam atau daur ulang dari hasil observasi yang

dilakukan penulis maka hasilnya masih digunakan plastic berwarna untuk membungkus daging.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terkait dengan perlindungan hukum represif ini memiliki kaitan dengan proses penegakan hukum, penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

a. Faktor hukumnya

Faktor hukumnya yang digunakan di dalam melakukan penegakan hukum atau norma yang digunakan adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional. Di dalam kedua peraturan tersebut sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan proses pemotongan hewan yang sesuai standard dan kesehatan daging. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut tidak disertai dengan pengaturan mengenai sanksi untuk pelaku yang melanggar ketentuan.

b. Faktor penegak hukum

Terkait dengan faktor penegak hukum, dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan Anang Mochdiono dan Yogi Pratama selaku penyidik pembantu & Satgas Pangan Polres Boyolali dimana belum pernah ada kasus mengenai kasus peredaran daging yang tidak sehat dan aman di

Kabupaten Boyolali. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yaitu terkait akses informasi adanya keterbatasan informasi terkait dengan adanya peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman, karena dalam hal ini tindakannya sangat sulit untuk di buktikan, perlu ada dampak di masyarakat terlebih dahulu.⁸

Jadi dari keterangan tersebut di atas, menunjukan penegak hokum di Kabupaten Boyolali secara personil masih terbatas jumlahnya dengan demikian menyebabkan keterbatasan informasi dan sidak ke lapangan.

c. Faktor sarana dan prasarana

Terkait dengan dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan Hendro, Kasi kesehatan masyarakat feteriner terkait dengan perlindungan secara represif selama ini belum ada, jika kasus berarti daging tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dan harus menimbulkan dampak, setelah itu di uji secara laboratorium terbukti mengandung bahan yang berbahaya atau tidak, selama ini tidak ada laporan dampak seperti itu. Secara teknis harus tepat tidak bisa berdasarkan prasangka. Ditelusuri daging sapinya, berasal dari mana apa betul karena daging sapinya atau proses selama.⁹

Dari keterangan tersebut dengan demikian dapat diketahui jika sarana prasaran untuk melakukan uji kualitas daging sangat lah terbatas dan harus dilakukan secara labolatorium dengan demikian menyebabkan tidak diketahuinya kualitas daging yang beredar di dalam masyarakat, pada akhirnya penegakan hokum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

d. Faktor masyarakat

Factor masyarakat sangat mempengaruhi proses penegakan hokum, telebih sesuai yang dinyatakan oleh Anang Mochdiono dan Yogi Pratama dimana aparat penegak hokum mengalami keterbatasan informasi di dalam melakukan penegakan hokum terhadap pemotongan dan peredaran daging

⁸Anang Mochdiono dan Yogi Pratama, Penyidik Pembantu & Satgas Pangan Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Hari Senin, tgl 29 Juli 2019 Pukul 15:00 WIB.

⁹ Hendro, Kasi Kesehatan masyarakat feteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Hari Senin, 29 Juli 2019, Pukul 11:00 WIB.

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian peran masyarakat seharusnya dapat menjadi lebih baik lagi, oleh karenanya kesadaran hukum dari masyarakat harus lebih baik juga, yang dimana akan di bahas oleh peneliti di pembahasan yang kedua.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan kelanjutan dari kebiasaan masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan peredaran daging yang ada dengan demikian sikap ini lama kelamaan menjadi budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penumbuhan kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran daging yang aman dan sehat.

Jadi dari beberapa keterangan terhadap pihak terkait tersebut dapat diketahui apabila proses perlindungan hukum secara represif di Kabupaten Boyolali belum berjalan dengan baik, hal ini jika dibandingkan dengan data yang diperoleh oleh penulis banyak pelanggaran ketentuan-ketentaun oleh pelaku usaha di Kabupaten Boyolali yang berpotensi terhadap beredarnya daging yang tidak sehat dan aman di Kabupaten Boyolali. Namun selama ini tidak pernah ada pelanggaran yang ditemukan oleh Dinas Peternakan atau Dinas Kesehatan maupun Kepolisian Reserse Kabupaten Boyolali.

3.2 Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Daging Sapi Berbasis Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum yang diteliti disini adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali, untuk memperoleh data maka penulis mengambil sampel di Boyolali sebanyak 266 responden yang mewakili kelurahan yang ada di masing masing kecamatan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan penyebaran quisioner dengan media cetak dan juga quisioner melalui google form. Indikator-indikator untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Pengetahuan hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Hal.123-124., hal.125.

Dari data yang diperoleh oleh penulis kepada 266 responden dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan hukum hasilnya lebih dari 50 % masyarakat setuju atau sangat setuju, sementara itu dibawah 50 % masyarakat tidak setuju, hal ini menunjukkan apabila pengetahuan masyarakat hukum tergolong baik, akan tetapi hal ini juga menjadi kekurangan karena presentase setuju tidak lebih dari 60 % rata-rata dengan demikian masih ada sebanyak 40 % masyarakat tidak mengetahui pengetahuan hukum mengenai peredaran daging sapi Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu dari 40 % masyarakat yang tidak setuju menunjukkan korelasi yang sesuai dengan bentuk perlindungan hukum yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2) Pemahaman hukum

Dalam hal ini data yang diperoleh dari 266 responden hasilnya pemahaman hukum lebih dari 60 % rata-rata masyarakat setuju dengan demikian masih ada sebanyak 40 % masyarakat di Kabupaten Boyolali tidak mengetahui pengetahuan hukum mengenai peredaran daging sapi Kabupaten Boyolali. Dari data yang disebutkan tersebut dengan demikian menunjukkan apabila pemahaman hukum masyarakat masih banyak yang tidak paham hal ini ditunjukkan dengan masih ada 40% masyarakat yang tidak paham mengenai hukum mengenai peredaran daging sapi, hal ini akan mengakibatkan tingkat perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah rendah, dikarenakan dengan pemahaman yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah daging yang ia konsumsi sehat dan aman atau tidak.

3) Sikap hukum

Hasilnya rata-rata 50-60 % masyarakat setuju atau sangat setuju, sementara 40-50% masyarakat tidak setuju.. dari data yang diperoleh dari masyarakat tersebut maka masyarakat memiliki sikap hukum yang baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang baik terhadap penilaian mengenai hukum itu sendiri, masyarakat juga memahami mengenai penilaian mana tindakan baik dan tindakan yang tidak baik, yang ditunjukkan lebih dari 60% masyarakat memiliki sikap yang baik, sementara di beberapa aspek 40 % masyarakat masih memiliki sikap hukum yang kurang baik. Dengan demikian meskipun sikap hukum yang dilakukan baik tidak

disertai pengetahuan, pemahaman dan perilaku hukum akan menyebabkan tidak berjalannya sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum itu sendiri.

4) Perilaku hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum digambarkan sebagai domain steril (bebas nilai) terpisah dari etis dan moral, disadari atau tidak ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku (*pattern of behavior*) di dalam masyarakat.¹¹ Hasil datanya hampir 80 % masyarakat setuju dan sangat setuju sementara 20% masyarakat ada yang setuju, dengan demikian menunjukkan perilaku hukum masyarakat terkait dengan pola pembelian sapi. Akan tetapi masih juga ada beberapa orang memiliki perilaku hukum yang kurang baik.

Namun untuk satu pertanyaan terkait dengan jika saya mengetahui perilaku masyarakat yang melakukan penjualan sapi/daging sapi yang tidak aman dan sehat saya melaporkan ke aparat penegak hukum hasilnya 30.8 % masyarakat setuju, 7.5% masyarakat sangat setuju dan sebanyak 41.7 % tidak setuju dan 19.9% masyarakat sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan dan akan berdampak kepada perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif atau represif sikap acuh dan tak acuh dari masyarakat ini. Oleh karena itu untuk mengembalikan penegakan dan citra lembaga peradilan perlu melakukan perenungan yang lebih dalam memaknai kehidupan sosial dalam negara hukum.¹²

Jadi dengan demikian dari uraian di atas merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisah, baiknya sikap hukum dan pola perilaku hukum jika tidak di barengi dengan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang baik tidak akan memberikan dampak kesadaran hukum yang baik pula. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hart yang menyatakan Hart percaya apabila manusia terbatas niat baik untuk orang lain meskipun secara moralitas manusia secara khusus memiliki tanggungjawab dan malu atas tindakan terburuk yang tidak bisa dihindari, yang dalam

¹¹ Absori dan Achmadi, 2017, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Nonsistematis Charles Sampord)*, Prosiding Konferensi Nasional ke 6, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) Hal. 108.

¹² Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.8, No.2 September 2005, hal.233

hal ini membuktikan keniscayaan tuhan sebagai sumber pertanggung jawaban yang diberikan.¹³Jadi perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, perlindungan hukum terkait peredaran daging sehat dan aman di Kabupaten Boyolali belum berjalan dengan baik atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran mengenai ketentuan-ketentuan di dalam pemotongan daging dan peredaran daging yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan potensi peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman, namun dalam hal penegakan hukum tidak berjalan dikarenakan banyaknya kendala baik dari factor hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan prasarana dan yang terumata ada factor masyarakatnya yang tidak ambil bagian di dalam proses penegakan hukum. *Kedua*, Perlindungan hukum peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum, kesadaran hukum merupakan faktor pendukung perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat melalui faktor pengetahuan hukum, pemahaman hukum, meskipun didukung oleh faktor sikap hukum dan pola perilaku hukum yang baik.

Dalam hal ini penulis memberikan saran *Pertama*, untuk pemerintah melalui dinas-dinas terkait atau aparat penegak hukum turut serta dan meningkatkan kesadaran hukum agar tingkat perlindungan hukum yang diberikan juga baik. *Kedua*, mengharapkan untuk masyarakat agar berperan lebih aktif di dalam perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi. *Ketiga*, mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan dan memanfaatkan penelitian ini sebagai salah satu referensi dan penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Absori, Ta'adi Samsuri, dan Khudzaifah Dimiyati, 2018, *Justice-Based Health Law: Study of Profession Equality Based Justice On Social Justice*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.18 No.2 May 2018,

¹³ Absori, Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, 2017, *Morality and law: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm*, Jurnal Dinamika Hukum Vo.17. No.1, Januari 2017, hal 29.

- Absori dan Muahammd Syiblunnur, 2017, *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupayen Kotawaringin Timur*, Surakarta: Megsiter Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Absori, Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Mimbar Hukum, Vol 2, No.2, Huni 2008.
- Absori dan Achmadi, 2017, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Nonsistematis Charles Sampord)*, Prosiding Konferensi Nasional ke 6, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)
- Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.8, No.2 September 2005.
- Absori, Khudzaifah Dimyati, dan Kelik Wardiono, 2017, *Morality and law: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm*, Jurnal Dinamika Hukum Vo.17. No.1, Januari 2017, hal 29
- Agung, 2016, *Mewaspada Makanan Tak Halal Menjelang Idul Fitri*, 30 Juni 2016, ugm.ac.id/id/berita/12032-mewaspada.makanan.tak.halal.menjelang.idul.fitri, diakses tanggal 7 januari 2019, Pukul 12:00 WIB.
- Ali, Achamd, 2012, *Meeguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence.*, Jakarta: Kencana.
- Aryogi dan Endang Romjali, 2017, *Potensi, Pemanfaatan dan Kendala Pengembangan Sapi Potong Lokal Sebagai Kekayaan Plasma Nutraf Indonesia*, Pasuruan: Lokakarya Nasioanl Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional.
- Indiraningsih, Sani, 2013, *Identifikasi Penyebab Kematian Sapi Potong Dalam Program PSDS-K di Jawa Tengah*, Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2013.
- Laica Marzuki, 1995. *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makasar*, Makasar: Hasanuddin Univeristy pers.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, 1982, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers,

Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty

Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/17/1016/populasi-sapi-potong-menurut-provinsi-2009-2017.html>, di akses pada hari senin 14 Januari 2019, Pukul 12:41 WIB.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/18/1038/produksi-daging-sapi-menurut-provinsi-2009-2017.html>, di akses pada hari senin 14 Januari, Pukul 12:51 WIB.

Subdirektorat Statistik peternakan, 2019, *Direktori Perusahaan Pertanian Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, Hal. 7.